

## Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sukabumi

Novia Efendi<sup>1</sup>, Ade Budi Setiawan<sup>2</sup> Maria Magdalena Melani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

<sup>1</sup>novia.efendi@unida.ac.id. <sup>2</sup>ade.budi.setiawan@unida.ac.id. <sup>3</sup>maria.magdalena.melani@unida.ac.id

### Abstract

*Good management of village funds is the key to realization of good governance. This research was purpose to analyze the effect of transparency, accountability and public participation, to the management of village funds in the villages of Cicurug sub-district, Cibadak sub-district and Parungkuda sub-district, Sukabumi District. The method used is quantitative research with associative problem formulation in the form of causal relationship. The total population are 30 viilages Cicurug sub-district, Cibadak sub-district and Parungkuda sub-district. The sample was selected using purposive sampling, so that 150 respondents were obtained. Data analysis using multiple linier regression. The results of this study showed that the variables of transparency, accountability and public participations simultaneous have a significant effect on performance management of village funds in the villages of Cicurug sub-district, Cibadak sub-district and Parungkuda sub-district, Sukabumi District. variables of transparency and accountability partial have a significant effect on performance management of village funds, while variable public participation has no significant effect on performance management of village funds in the villages of Cicurug sub-district, Cibadak sub-district and Parungkuda sub-district, Sukabumi District.*

*Keywords: management of village funds, transparency, accountability, public participation.*

### Abstrak

Pengelolaan Dana Desa yang baik merupakan kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat teradap pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Cicucurg, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah assosiatif berbentuk hubungan kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 Desa di Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga di dapatkan 150 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Variabel transparansi dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan sedangkan variabel partisipasi masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

© 2024 Jurnal Pustaka Aktiva

### 1. Pendahuluan

Dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang ditetapkan dalam

sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintah. karakteristik utama pada *good governance*, salah satunya adalah Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. [1]. *Good Governance*

menjadi paradigma yang baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terkecuali di desa. Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat [2]. Desa menyatakan bahwa desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transparansi dan Akuntabilitas yang di maksud diatas dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatis serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran [3]. Dalam proses penyaluran dan besarnya jumlah Dana Desa tersebut membuat para pengelola keuangan desa rawan untuk melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Dana Desa karena tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi [4].

Penerapan akuntansi pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga dilakukan ditingkat diwilayah pedesaan, sama halnya di pemerintah pusat ditingkat desa juga membutuhkan pertanggungjawaban atas setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar terutama di pedesaan. Pada perkembangannya desa saat ini sudah mulai maju dalam berbagai aspek sehingga tercapai beberapa tujuan sehingga desa mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam lingkungannya desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan yang di miliki masyarakatnya agar tercapai kejehateraan.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Karena jumlah penduduknya yang tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakat biasanya terjalin kuat. Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014, regulasi tersebut memberikan kewenangan dan peran yang cukup besar terhadap pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan

merencanakan pembangunan. Dalam pengembangan wilayah pedesaan pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran. Hal ini telah menarik perhatian public, mengingat dana desa langsung pemerintah ke desa mencapai 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara, tentu diperlukan sistem akuntabilitas yang jelas serta dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik.

Good Governance menjadi paradigma yang baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terkecuali di desa. Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari rencana strategi pemerintahan mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah merupakan prasyarat bagi tercapainya birokrasi dan pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Pentingnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk berbagai pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan cara yang efisien, efektif dan terukur kerjanya. Keberhasilan akuntabilitas dapat dicapai dengan adanya pemimpin yang akuntabel akan transparan kepada masyarakat maupun bawahannya (Dewi, 2018).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengertian Keuangan Desa dalam Permendagri adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhankegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan rencana agar dapat mewujudkan masyarakat sejahtera.

Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kabupaten Sukabumi ialah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah 41.145 Km<sup>2</sup> terdiri dari 47 kecamatan, 381 Desa dan 5 kelurahan. Tahun 2022 alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD diterima seluruh desa di

Kabupaten Sukabumi. Penyaluran telah dilakukan dan dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta semua komponen yang terdapat dalam APBD juga perlu dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan Kabupaten Sukabumi sebelumnya pernah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Peneapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dalam pengelolaan Dana Desa yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan tentang pedoman teknis dan tata cara dana dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah. Dalam pasal 8 penyaluran Dana Desa dilakukan bertahap yaitu tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%. Pasal 14 juga dijelaskan penggunaan Dana Desa untuk membiayai bidang pembangunan Desa, paling banyak sebesar 70% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, paling sedikit 30%. Dalam proses penyaluran dan besarnya jumlah Dana Desa tersebut membuat para pengelola keuangan desa rawan untuk melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Dana Desa karena tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2015 sebanyak 676 terdakwa korupsi berasal dari perangkat desa. Semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi (Ombudsman.go.id).

Dikutip dari Suarajabar.id Kepala Desa Kalandungan, Kabupaten Sukabumi Asep Saefudin diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019-2020. Perbuatannya merugikan negara lebih dari Rp. 713 Juta. Angka itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Dikutip dari Sukabuminow.com Kepala Desa Tenjolaya Kabupaten Sukabumi melakukan tindakan korupsi sejumlah anggaran dari DD, ADD, Bankeu Kabupaten dan Bankeu Provinsi tahun anggaran 2019 dan 2020. Serta dikutip dari Sukabmiupdate.com Kepala Desa tenjolaya juga melakukan korupsi BLT Dana Desa tahun 2020 tahap 4, 5 dan 6 BLT Dana Desa itu tidak dibayarkan selama tiga bulan kepada 116 KPM dengan Total Rp. 149 juta. Selain itu, penyelewengan dana desa juga kembali terjadi oleh kepada desa yang ada di Kabupaten Sukabumi dikutip dari megapolitan.antaraneews.com Kepala Desa Kademangan selewengkan dana desa Rp. 685 Juta yang merupakan Anggaran Dana Desa, Dana Desa anggaran 2018-2019 dan bantuan Provinsi Jabar tahun 2019. Dari hasil perhitungan, adapun rincian penyelewengan yang dilakukan, untuk ADD, DD dan Bantuan Provinsi Jabar tahun anggaran 2018 yang dikorupsi senilai Rp. 240 juta, kemudian pada

tahun anggaran 2019 menyelewengkan ADD tahap I serta DD tahap II dengan total Rp. 333 Juta, selain itu melakukan penggelapan dana kelebihan bayar yang melebihi volume Rp. 111 juta yang seharusnya anggaran tersebut dikembalikan ke negara. Diketahui bahwa terdapat banyak desa pada 2 kecamatan di 20 desa Kabupaten Sukabumi yang masih belum transparan terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa (Setiawan dkk, 2022). Dalam musyawarah desa, pemerintah desa mengharuskan dilakukan keterbukaan terhadap masyarakat yang ikut berusul dalam pembangunan desa serta prinsip transparan yang bisa terpenuhi dengan adanya perencanaan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. Sama halnya dengan Pengelolaan keuangan desa harus memegang prinsip akuntabilitas sehingga pemerintah desa mempertanggungjawabkan dana yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Nugroho dkk (2022), Putra dan Rasmini (2019), Dewi dkk (2019) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Pada peneliti Amleni dkk (2022) memberikan hasil akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Aryanti dan Nafizar (2022) menunjukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian juga dilakukan oleh Adriani (2018) dan Putra dan Rasmini (2019) yang meneliti mengenai transparansi dan menunjukan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam penelitian Amleni dkk (2022) transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pada penelitian yang dilakukan juga oleh Nugroho dkk (2022) dan Iqbal dan Fadli (2019) memberikan hasil bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Sarah (2020) menunjukan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti di desa yang ada Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada kasus yang sama berkaitan dengan dana desa sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan dana desa serta terfokus pada pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Peneliti memilih desa di Kecamatan Cicurug Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda untuk dijadikan objek penelitian karena mempertimbangkan keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu dan biaya perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian sehingga peneliti memilih desa yang ada di Kecamatan Cicurug Kecamatan Cibadak dan

Kecamatan Parungkuda. Serta dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu menggunakan variabel bebas dimana hasil menunjukkan ada variabel bebas yang berpengaruh dan ada variabel bebas yang tidak berpengaruh. Sehingga peneliti mengenai pengelolaan dana desa merupakan salah satu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan melakukan pengujian ulang variabel bebas tersebut.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sukabumi.”

## 2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan statistic dan data penelitian berupa angka-angka. Lokasi penelitian dilakukan pada 13 Desa di Kecamatan Cicurug, 9 Desa di Kecamatan Cibadak dan 8 Desa di Kecamatan Parungkuda. Perolehan data yang bersumber dari quesiner yang disebarakan sesuai dengan kriteria sampel, jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 360 perangkat Desa dan diperoleh sampel 150 perangkat Desa.

### 2.1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran peneliti, dapat berupa orang atau institusi. Sugiyono (2010: 13) menyatakan bahwa Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sedangkan subjeknya adalah perangkat desa di pemerintahan desa yang terkait dalam pengelolaan dana desa. Untuk lokasi penelitiannya sendiri akan dilakukan pada Desa yang berada di Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda di Kabupaten Sukabumi.

### 2.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah assosiatif berbentuk hubungan kausal. Sugiyono (2013: 7) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme atau teori akuntansi. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena analisis menggunakan statistic dan data penelitian berupa angka-angka. Sedangkan untuk rumusan masalah assosiatif adalah suatu rumusan masalah pada penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua varibael atau

lebih. Dan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat

### 2.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel didefinisikan sebagai suatu atau apapun yang mempunyai nilai dan dapat diukur, baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) (Chandarin, 2017: 82). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Sugiyono (2013: 39) Variabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) sedangkan variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat..

### 2.4. Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Unit Analisis merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis selanjutnya (Sekaran, 2009). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Desa di Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Chandarin (2017: 125) Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu 13 Desa di Kecamatan Cicurug, 9 Desa di Kecamatan Cibadak dan 8 Desa di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan dana desa di tiap desa yang ada di Kecamatan Cicurug, dengan kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti sebagai berikut: (1). Kepala Desa dengan masa jabatan lebih dari 1 tahun; (2). Sekretaris Desa yang membantu kepala desa dalam bidang administrasi dana desa; (3). Bendahara/Kaur Keuangan yang mengurus sumber pendapatan dan pengeluaran Desa; (5). KASI Program khusus pelaksanaan kegiatan anggaran pengelolaan keuangan desa

Tabel 2.1 Rekapitulasi Sampel

Kriteria	Jumlah
Kepala Desa	30

Sekretaris Desa	30
Bendahara/Kaur Keuangan	30
KASI Program	60
Jumlah Sampel	150

Sumber: Data Diolah (2022)

2.5. Teknik Analisis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok (Chandarin, 2017: 123). Teknik pengumpulan data menggunakan instrument kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Adapun prosedur dalam pengumpulan data yang dilakukan antara lain.

2.6 Metode Pengujian Data

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Sugiyono (2015: 93) Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Bobot nilai yang digunakan dalam setiap pertanyaan/pernyataan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penilaian Kuesioner

Jawaban Responden	Bobot Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2013: 94)

Pengelolaan data ordinal menjadi analisis regresi terlebih dahulu harus ditransformasikan ke bentuk data interval dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Nilai Tertinggi-Nilai Terendah}}{\text{Banyaknya Kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Setelah besarnya diketahui, kemudian dibuat rentang skala sehingga dapat diketahui di mana rata-rata penilaian responden terhadap setiap unsur diferensiasi dan sejauh mana variasinya. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval tersebut diperoleh kriteria penelitian pada tabel 3.4 berikut:

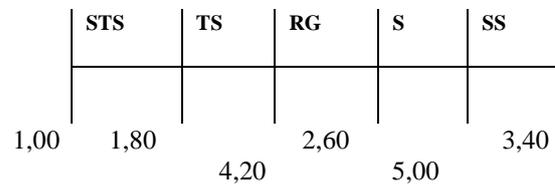
Tabel 2.3 Skala Penilaian

Skala	Interpresentasi
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
2,61 – 3,40	Ragu-ragu
3,41 – 4,20	Setuju
4,21 – 5,00	Sangat Setuju

Sumber : Sugiyono (2013: 94)

Untuk membantu dalam penelitian Skala Likert menggunakan diagram di bawah ini:

Tabel 2.5 Skala Penilaian



Sumber: Sugiyono (2013: 95)

Dapat dilihat rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden tersebut, dengan menggunakan rumus (1):

$$M = \frac{F \times \text{Skor}}{N} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- M = Kriteria penilaian rata-rata
- F = Frekuensi jumlah responden
- Skor = Pembobotan skala hasil
- N = Jumlah sampe

Uji Validitas

Suyigono (2013: 121) menyatakan instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, valid berarti

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian yang valid berarti terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu dengan mengkolerasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Jika koefisien kolerasinya sama atau di atas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid tetapi jika nilai kolerasinya kurang dari 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 3.5 Kriteria Uji Validitas

Corrected Item Total Correlation	Keterangan
≥ 0,3	Valid
≤ 0,3	Tidak Valid

Sumber: Sugiyono (2013)

### Uji Reliabilitas

Hasil penelitian yang realibel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono (2013: 121) instrument yang realibel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reabilitas masing-masing instrument yang digunakan, penulis menggunakan koefisien *cornbach alpha* ( $\alpha$ ) dengan menggunakan software *IBM SPSS Statisticsts 25*. Kriteria untuk memenuhi uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kriteria Uji Reliabilitas

Cronbach Alpha	Keterangan
≥ 0,6	Reliabel
≤ 0,6	Tidak Reliabel

Sumber: Sugiyono (2013)

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 . Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
T	146	26	35	30,51	2,257
A	146	25	35	30,34	2,651
PM	146	22	30	26,75	2,023
DD	146	21	30	25,96	2,100
Valid N (listwise)	146				

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kuesioner yang disebar sebanyak 150 kuesioner dengan persentase 100%. Dari jumlah tersebut terdapat kuesioner yang tidak dapat kembali sebanyak 2 kuesioner dengan persentase 1%, dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 148

kuesioner dengan persentase 99%, kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 2 kuesioner dengan persentase 1%, sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 146 kuesioner dengan persentase 97%

### 3.2. Pengujian Instrumen

#### 1) Uji Validitas

Tabel 3.2 Uji Validitas

No	Variabel	r <sub>hitung</sub>	r <sub>kritis</sub>	Keterangan
1	Transparansi	0,601	0,3	Valid
2	Akuntabilitas	0,702	0,3	Valid
3	Partisipasi Masyarakat	0,650	0,3	Valid
4	Pengelolaan Dana Desa	0,679	0,3	Valid

Berdasarkan hasil SPSS, menunjukkan bahwa dilihat dari skor rata-rata variabel menunjukkan bahwa nilai r<sub>hitung</sub> yang lebih dari 0,3 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen yang digunakan valid, dan layak digunakan.

#### 2) Uji Validitas

Tabel 3.3 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	r <sub>kritis</sub>	Keterangan
1	Transparansi	0,700	0,6	Reliabel
2	Akuntabilitas	0,828	0,6	Reliabel
3	Partisipasi Masyarakat	0,722	0,6	Reliabel
4	Pengelolaan Dana Desa	0,762	0,6	Reliabel

Berdasarkan hasil SPSS, semua nilai tersebut menunjukkan lebih besar dari r<sub>kritis</sub> yaitu 0,6. Maka semua instrument variabel dinyatakan reliabel.

### 3.3. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Tabel 3.4 Uji Normalitas One Sample KS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		146
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,81441606
Most Extreme Differences	Absolute	,060
	Positive	,060
	Negative	-,039
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Berdasarkan hasil SPSS, menunjukkan bahwa hasil pengujian *One Sampel Kolmogorov Smirnov* memiliki nilainya 0,060 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

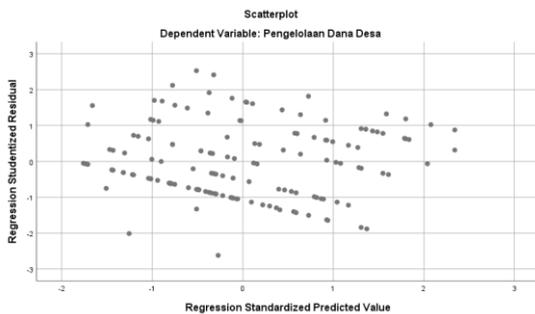
Tabel 3.5 Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Transparansi	,934	1,070
	Akuntabilitas	,934	1,070
	Partisipasi Masyarakat	1,000	1,000

Berdasarkan hasil SPSS, Semua variabel tersebut memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

3) Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Grafik Scatter Plots



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, . Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak digunakan.

3.7 Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 3.6 Analisis Regresi Bergsnds

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Std. Coef	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,354	3,130		2,988	,003
	Transparansi	,241	,070	,258	3,446	,001
	Akuntabilitas	,294	,059	,371	4,947	,000
	Pastisipasi Masyarakat	,013	,075	,012	,171	,864

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 9,354 + 0,241x_1 + 0,294x_2 + 0,013x_3 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut diketahui bahwa variabel Transparansi (X<sub>1</sub>), Akuntablitas (X<sub>2</sub>) dan Partisipasi Masyarakat (X<sub>3</sub>) bernilai positif, sehingga menunjukkan semakin tinggi nilai dari ke

dua variabel, maka Pengelolaan Dana Desa (Y) akan semakin tinggi.

3.5 Hasil Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Tabel 3.7 Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,504 <sup>a</sup>	,254	,238	1,833

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai R sebesar 0,504 yang menunjukkan bahwa nilai R (0,504) tersebut berada pada interval nilai R (0,40-0,599) dengan derajat kekuatan hubungan yang sedang, sehingga terdapat pengaruh yang sedang antara variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana desa.

3.6 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel 7, diperoleh nilai R<sup>2</sup> (R Square) sebesar 0,254 atau (25,4%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sebesar 25,4%. Sedangkan sisanya 74,6% dipengaruhi oleh faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.7 Uji Hipotesis

1) Uji F

Tabel 3.8 Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,398	3	54,133	16,103	,000 <sup>b</sup>
	Residual	477,355	142	3,362		
	Total	639,753	145			

Karena F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> (16,103 > 2,66) dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Kondisi tersebut bermakna bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

2) Uji T

Berdasarkan hasil uji dari uji t, maka H1 variabel transparansi (X<sub>1</sub>) memiliki nilai t<sub>hitung</sub> ≥ t<sub>tabel</sub> (3,446 ≥ 1,977), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,001 < 0,05, Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. H2 variabel akuntabilitas (X<sub>2</sub>) Karena nilai t<sub>hitung</sub> ≤ t<sub>tabel</sub>

(4,947 $\geq$ 1,977), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 < 0,05, Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.  $H_3$  variabel partisipasi masyarakat  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  (0,171  $\leq$  1,977), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,864 > 0,05, Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

### 3.8 Pembahasan

1) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat, yaitu dengan angka yang positif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Pengaruh positif tersebut dapat diartikan semakin tinggi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi pula pengelolaan dana desa yang akan dihasilkan. Sehingga agar pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda meningkat pemerintah desa harus memiliki transparansi yang mudah dijangkau masyarakat, menerapkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam suatu perencanaan desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho (2022) serta Rasmini (2019) yang hasilnya secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

2) Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji parsial, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, diantaranya keterbukaan prosedur pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana. Semakin baik transparansi maka semakin baik juga pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda. Pada pernyataan kuesioner transparansi yang menyatakan adanya website atau media publikasi yang menyediakan informasi-informasi penting berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan. Pemerintah desa juga terbuka dalam informasi dan juga melibatkan masyarakat dalam

musyawarah desa hal tersebut dimana masyarakat memberikan pendapatnya pada program pemerintah desa yang akan dilaksanakan dimana program tersebut dibiayai oleh dana desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sarah (2020) yang hasilnya secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini yaitu pada Dewi (2019) dengan hasil secara parsial transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

3) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji parsial, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, terbukti bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan semakin baik akuntabilitas yang dilakukan berpengaruh terhadap baiknya dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Akuntabilitas ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan adanya laporan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden pada item indikator pernyataan yang telah disediakan. Adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Sarah (2020) yang menunjukkan hasil penelitian secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

4) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Dilihat dari nilai kontribusi partisipasi masyarakat pada pengelolaan dana desa sebesar 0,02%. hal ini terlihat dari hasil kuesioner berdasarkan item pernyataan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan ide, keahlian, keterampilan maupun tenaga untuk pelaksanaan program pemerintah yang dilaksanakan. Sehingga partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

kurang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pernyataan dalam variabel Partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut memiliki pengaruh dengan signifikan yang sangat kecil terhadap pernyataan pada pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa adanya laporan mengenai rincian dana penggunaan keuangan desa kepada masyarakat. Hal ini berarti pelaksanaan kegiatan dalam menyusun perencanaan kurang melibatkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program yang akan dibuat dengan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nafsiah (2020) dengan hasil partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan secara parsial transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Parungkuda.

#### Daftar Rujukan

- [1] Bahri, Syaiful, et. all, 2021, Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Media Sains Indonesia. [Online]. Available: [http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku%20Digital%20-%20AKUNTANSI%20SEKTOR%20PUBLIK\\_compress.ed.pdf](http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku%20Digital%20-%20AKUNTANSI%20SEKTOR%20PUBLIK_compress.ed.pdf).
- [2] Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta. [Online]. Available : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- [3] Ombudsman Republik Indonesia [Online]. Available: <https://www.pmbudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-mengawasi-dana-desa>
- [4] Indonesia.2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta. [Online]. Available: [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf).
- [5] Peraturan Indonesia.2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Jakarta. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>
- [6] Raharzo, Muhammad Mu'iz, 2021, Tata Kelola Pemerintahan Desa. PT. Bumi Aksar.
- [7] Mardiasmo, 2017, Akuntansi Sektor Publik Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [8] Purwanti, Umi, 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Dsa Di Desa Melilian Kecamatan Gelombang Kabupaten Muara Eni. Jurnal Ilmu. [Online] Available: <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/35>
- [9] Kurnia, R., Sebrina, N., dan Halmawati, 2019, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1 No. 1 ISSN : 2656-3649. [Online]. Available: <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea/article/download/69/37/>
- [10] Mustanir, A., dkk. 2019. Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan LaLebat Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government Vol. 2 No. 1 ISSN : E- 2620-3014. [Online] Available: <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/clean/article/view/212>
- [11] Jamal, dkk., 2020 Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciro Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Pemerintahan 8(3): 207-12. [Online] Available: <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/298>